



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 644 /AA.05/2019
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2019

30 Desember 2019

Yth. **Walikota Dumai**
di

Dumai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Dumai. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Dumai memperoleh nilai **61,15** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Dumai telah menunjukkan hasil yang baik.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,43	20,18
b.	Pengukuran Kinerja	25	11,57	12,68
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,24	10,24
d.	Evaluasi Internal	10	6,69	6,69
e.	Capaian Kinerja	20	10,52	11,36
	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,46	61,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Simpulan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Dumai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Dumai telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Namun demikian, penerapan tersebut belum mampu menggambarkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan, kualitas indikator kinerja serta kualitas pemantauan dan evaluasi kinerja. Rekomendasi dari hasil evaluasi tahun 2018 sudah ditindak lanjuti, akan tetapi belum tuntas diselesaikan;
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Dumai adalah:
 - a. Perumusan Sasaran Strategis pada RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah (PD) belum komprehensif menggambarkan kinerja yang diharapkan. Masih terdapat sasaran strategis yang belum berorientasi hasil;
 - b. Belum seluruh indikator kinerja memenuhi kriteria kualitas yang baik, terutama terkait dengan keterukuran (*measurable*), relevansi dengan sasaran strategis yang akan diukur dan berorientasi hasil;
 - c. Pemerintah Kota Dumai telah melakukan penjabaran kinerja, namun hasil penjabaran kinerja tersebut masih perlu untuk disempurnakan guna memastikan keselarasan dan ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - d. Belum seluruh program dan kegiatan berkorelasi langsung terhadap capaian sasaran strategis. Masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak selaras dengan capaian sasaran strategis;
 - e. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Ukuran kinerja dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai;
 - f. Evaluasi program belum dilakukan. Evaluasi program seharusnya dilakukan oleh penanggungjawab program untuk menilai ketercapaian hasil program;
 - g. Pemanfaatan aplikasi *monitoring* dan evaluasi kinerja di PD belum berjalan optimal. Informasi kinerja belum efektif dalam memicu berbagai perbaikan yang diperlukan; dan
 - h. Evaluasi akuntabilitas internal belum mampu sepenuhnya memacu perbaikan akuntabilitas PD.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan kualitas penjabaran kinerja dan *cross-cutting* kinerja lintas PD untuk menghasilkan perencanaan terintegrasi yang berkualitas;

2. Pemerintah Kota Dumai agar melakukan reuiu dokumen perencanaan untuk semua level untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator, dan penetapan target yang tepat;
3. Melakukan reuiu atas keselarasan antara kegiatan, program dengan sasaran strategis untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran efisien dan efektif untuk mencapai sasaran pembangunan;
4. Melaksanakan evaluasi pengelolaan program secara berkala dengan berfokus pada ketercapaian hasil program serta keterpaduan lintas PD;
5. Meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh;
6. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan oleh Inspektorat dengan meningkatkan kualitas rekomendasi dan pengawasan tindak lanjut;
7. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP. Penguatan budaya kinerja ini juga sebaiknya ditunjang dengan pelaksanaan reuiu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Dumai. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan



Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Riau